

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan untuk mencapai suatu pembangunan yang didasari oleh manusia bukan sesuatu hal yang baru untuk Indonesia dimana mengalami tekanan dalam mencapai tujuan tersebut antara lain pemenuhan mutu Pendidikan bersifat universal, meningkatkan kesehatan serta mampu memberantaskan kemiskinan (Ardiansyah, dkk, 2014). Yang dimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Tumpuan dalam membangun Indonesia sebenarnya telah berpedoman pada konsep IPM tertulis dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), yang dimana sudah tertulis bahwa skema proses manusia itu menghendaki peningkatan kualitas hidup manusia baik secara jasmani ataupun rohani.

Peningkatan IPM tidak hanya bertumpu pada perkembangan ekonomi karena perkembangan ekonomi terbaru adalah persyaratan agar ekonomi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan manusia, oleh karena itu harus dilakukan pemerataan pembangunan dengan persyaratan yang cukup (Ardiansyah, dkk, 2014). Pemerataan pembangunan menjamin kalau penduduk bisa menikmati hasil dari pembangunan, Hasil dari survey negara lain bahwa percepatan pembangunan untuk memperoleh dua tujuan yang dilakukan oleh manusia diantaranya pemerataan

pendapatan distribusi serta pengalokasian perbelanjaan yang memadai disektor publik (Marhaeni, *et al.*, 2008) dalam Ardiansyah, dkk, (2014).

Pemerintah Daerah memberikan hak penuh bagi tiap-tiap daerah, ditingkatan provinsi, ataupun di tingkatan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit intervensi pemerintah pusat yang tertulis dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Kebijakan tersebut disebut juga Otonomi Daerah. Dengan adanya desentralisasi atau otonomi daerah, pembangunan ini diharapkan berhasil Karena faktor indikatornya adalah pembangunan, atau IPM, hipotesa tersebut bisa juga ditingkatkan (Rondiineli dan Chema, 1983; Davodi dan Zou 1998; Syaukani dan Rasyid, 2001; Fisman dan Gatti, 2002; Devas dan Grant 2003) dalam Ardiansyah, dkk, (2014).

Seperti yang dilansir dalam antarasultra.com menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sultra masih tergolong rendah karena masih menduduki posisi urutan 25 dari 33 provinsi di Tanah Air. Ada empat sektor strategis yang mempengaruhi IPM yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Pada sektor pendidikan di Sultra belum mampu menyumbangkan peningkatan IPM dikarenakan minimnya melek huruf, sedangkan kesenjangan kinerja di sektor kesehatan yang mencakup kabupaten / kota masih cukup tinggi. Begitu pula pentingnya peran pemda sultra di sektor infrastruktur agar mendukung pertumbuhan sektor tersier (terutama perdagangan) yang mengalami pertumbuhan di Sultra yang begitu pesat. Selain itu di sektor pertanian, pentingnya pemerintah mengupayakan pembaruan sektor pertanian yang menjadi penggerak presentase kenaikan pada ekonomi di Sultra. Dari beberapa sektor

tersebut seperti sektor pendidikan sudah di atas angka rata-rata nasional, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sultra yang kini di atas angka delapan persen, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sultra demi meningkatkan angka pendapatan domestik regional bruto (PDRB) perkapita yang saat ini masih dibawah angka PDRB per kapita ditingkat nasional.

Aspek krusial yang diperhatikan dalam desentralisasi yaitu permasalahan desentralisasi fiskal. Secara terkonsep, desentralisasi fiskal disyaratkan bahwa setiap hak yang diberikan oleh daerah harus disertakan dengan taksiran yang besar sesuai dengan kapasitas hak tersebut (Ardiansyah, dkk, 2014). Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menjamin tugas serta wewenang dari pusat ke daerah

Pemerintahan yang dijalankan oleh daerah tentu akan sangat membantu dengan pendapatan daerah tersebut. Banyaknya penghasilan daerah yang didapatkan, bisa memenuhi kebutuhan daerah serta pembiayaan yang bisa diharapkan masyarakat (Christy dan Adi, 2009) dalam Putra dan Ulupui (2015). Pendapatan Asli Daerah (PAD) hak yang ditujukan untuk pemerintah daerah dalam mendanai otonomi daerah sebagai perwujudan dalam desentralisasi yang sesuai dengan kemampuan daerah tersebut (UU No. 33 / 2004). PAD seperti retribusi, pajak daerah BUMD / laba perusahaan dan sebagainya merupakan pendapatan yang sah. Kuncoro (2007) dalam Ardiansyah, dkk (2014) PAD juga disebutkan bahwa biaya pembelanjaan pemerintah daerah maksimal 20%. Kemandirian daerah menunjukkan belum terlaksana sepenuhnya.

PAD mempunyai pedoman dalam biaya daerah, PAD yang semakin besar mempunyai kemampuan untuk pencapaian otonomi daerah yaitu peningkatan layanan serta kemakmuran penduduk yang terukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang berjalan dengan tepat dan sesuai rencana. Ardiansyah, dkk, (2014) hasil dari penelitian yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan atas Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya Lugastoro (2013) dengan hasil yaitu PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Penelitian serupa yang juga dilakukan Setyowati dan Suparwati (2012) menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Hal sama juga terjadi pada penelitian Putra dan Ulupui (2015) yaitu PAD secara konsisten mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

(UU No.25 Tahun 2005) Pemerintah menerbitkan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dana perimbangan antara lain terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana ini juga bertujuan untuk mengurangi ketidak seimbangan keuangan daerah (*horizontal imbalance*). Dana perimbangan yang berasal dari dana APBN adalah dana yang diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan dengan dana pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah, daerah untuk belanja kebutuhan daerah, belanja yang dimaksud sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat oleh karena itu dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dapat tercapai (Irwanti Eva, 2014).

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah DAU dimana dana ini berasal dari APBN yang ditunjukkan untuk pemerataan keuangan daerah agar memberikan kebutuhan keluaran dalam rangka desentralisasi., (Setyowati dan Suparwati, 2012). Oleh karena itu dibutuhkan masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi agar pembangunan akan berhasil, karena saat ini kemajuan daerah yang diukur dari kekayaannya tidak hanya alokasi tinggi tetapi juga pembagian dana yang besar bagi daerah untuk peningkatan kemakmuran. Seperti yang dikutip Setyowati dan Suparwati (2012), bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan pada penelitian Lugastoro (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM karena peningkatan DAU justru menyebabkan penurunan IPM .

Dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah DAK sebenarnya hanya sebagai perlengkapan atau penambahan jenis dana pengimbangan lainnya. DAK dalam Penggunaan dan pemanfaatan menjadikan faktor penting dalam program untuk pembangunan daerah (Usman dkk, 2008) dalam Putra dan Ulupui (2015). Sebab DAK yang apabila dikelola bisa meningkatkan mutu kualitas IPM anggaran belanja yang memiliki modal terstruktur yang bisa meningkatkan kemakmuran publik. Hal ini didukung dengan penelitian Setyowati dan Suparwati (2012), serta Lugastoro (2013) menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf dan Wihastuti (2008). Proses yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang outputnya secara bertahap mempunyai indikator

sehingga bisa diukur berhasil pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi bisa diukur dengan menerapkan tiga pengukur utama antara lain: 1) pengumpulan dana antara lain meliputi jenis investasi atau semua bentuk yang memiliki peralatan fisik, dan sumber daya manusia, serta dirancang pada tanah yang ditanamkan; 2) proses peningkatan pekerja ditahun yang akan datang dengan memiliki pertumbuhan yang meningkat; 3) kemajuan teknologi.

Kualitas pelayanan publik dan kemakmuran masyarakat dalam upaya yang dimana pembangunan tidak lagi bergantung pada sumber daya alam (*natural resources based*), tetapi pada kekuatn sumber manusia (*human resources based*). Dan satu hal yang seringkali dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi. (Ginting dkk, 2008) dalam Setyowati dan Suparwati (2012). Demikian pula indeks pembangunan manusia diIndonesia di tentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap IPM. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro (2013) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM.

Penelitian ini merupakn replika dari penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah, dkk (2014), yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, dengan menambahkan variabel Pertumbuhan Ekonomi (Setyowati dan Suparwati, 2012). Perbedaan Penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian terdahulu mengambil lokasi di

kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012 (Ardiansyah, dkk, 2012). Sedangkan dalam penelitian ini mengambil sampel di Badan Pusat Statistik di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2012-2014. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Alasan diadakan riset ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk kepentingan belanja modal serta menganalisis dampak penggunaan belanja tersebut terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang dalam penelitian ini diukur melalui indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan selama tiga tahun berjalan yaitu pada tahun 2012-2014.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh Rumusan Masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara?

2. Apakah Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Apakah Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi, Sulawesi Tenggara.
3. Untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Untuk menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi, Sulawesi Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat, antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian dibidang akuntansi sektor public khususnya dalam hal indeks pembangunan manusia. Selain itu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu ekonomi dibidang akuntansi sector publik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, selain itu di harapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti .
- 2) Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar lebih meningkatkan kualitas *indeks pembangunan manusia* di daerah-daerah.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, Sebagai bahan referensi bagi untuk peneliti lain yang akan melakukan kajian yang lebih luas dari penelitian ini.